

# **TESIS**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP  
RAFITIKASI *PROTOKOL MONTREAL* DALAM  
HAL PEMAKAIAN PESTISIDA TERBATAS  
*METIL BROMIDA***



**Oleh :**

**CAROLUS WAHYU HERMAN BUDIYANTO  
NPM : 22310006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2024**

# TESIS

## TANGGUNG JAWAB PESISIRI\$TAH TERHADAP !4AFITIKA.\$1PROYOKOL MONTREAL DALABJ MAL PEMAKAIAN PESTfSIDA TEfIBATAS *HEYIL BROHIDA*

Untuk Memenuhi *Pereyaran*  
Cuna h1emperoleh Gelar 34agister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Xusums Surebaya



Oleh :

CASOLUS WAHYU HERMAN BUDIYANTO  
NPM : 22310006

PROGRAM! STUDJ MAGISTER ILML1 HUKUM  
FAKULTAS HIJKUM  
UNIVEßSI7AS WIJAYA KUiJLJMA SUKAßA1'A

TESIS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP  
RAFITIKAS1PROrozOL ñfoNr>tzAL DALAM HAL  
PEMAKAIAN PESTISIDA TERBATAS *METAL BROMIDE*

Dibuat oleh:

CAROLUS WAHYU HERMAN BUDIYANTO

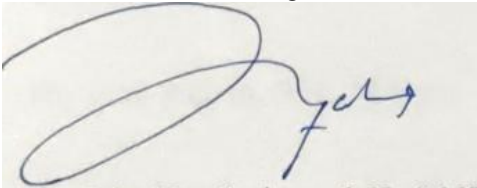
NPM: 22310ti06

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 10 Januari 2024

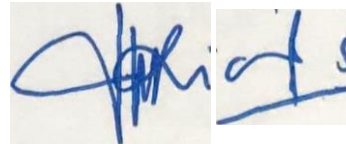
Oleh

Pembimbing I



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H


Pembimbing II



Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP  
RAFITIKASI *PROTOCOL äfONTREAL* DALAM HAL  
PEMAKAIAN PESTISIDA TERBATAS *METIL BRO3fIDA***

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**CAROLUS WAHYU HERMAN BUDIYANTO**

**NPM: 2231tiii06**

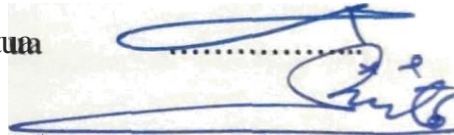
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal .....

Susunan Dewan Penguji

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. **Ketua**



Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. **Anggota**



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum **Anggota**



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. **Anggota**

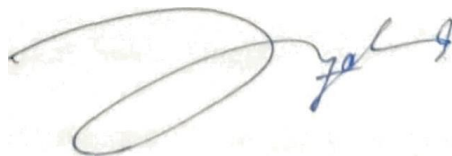


Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM **Anggota**



Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyamtan untuk  
memperoleh gelar Magister  
Tanggal .....

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Carolus wahyu Herman Budiyanto  
NPM 22310006  
Alamat : Jln Kedung Pengkol gang 6 no 5 Surabaya  
No. WA 0811344006 dan 081329517962

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Ratifikasi *Protokol montreal* Dalam Hal Pemakaian Pestisida Terbatas *Metil bromida*” adalah mumi gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Januari 2024

Yang menyatakan,



CAROLUS WAHYU HERMAN BUDIYANTO

## KATA PENGANTAR

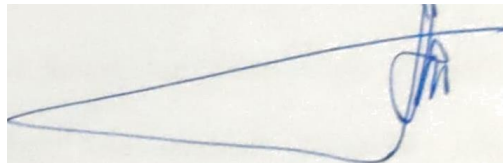
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM Selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
6. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.

7. Kepada keluarga orang tua penulis Johannes Soehirman [1] dan Isten tercinta Marlinawati [1], S.H. beserta keluarga besar yang memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberikan energi positif sehingga tesis ini **terselesaikan**.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 10 Januari 2024  
Yang menyatakan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CAROLUS WAHYU HERMAN BUDIYANTO', written on a light-colored background.

**CAROLUS WAHYU HERMAN BUDIYANTO**  
NPM 22310006



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	8
1.3 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kajian Teoritis.....	10
1.4.1 Tanggung Jawab Pemerintah .....	10
1.4.2 Ratifikasi <i>Protokol montreal</i> .....	20
1.4.3 Jenis-Jenis Pestisida di Indonesia .....	23
1.4.4 Pestisida <i>Metil bromida</i> .....	27
1.5 Metode Penelitian.....	29
1.6 Sistematika Pertanggungjawaban.....	31
BAB II BENTUK PELANGGARAN YANG TERJADI DARI PELAKSANAAN PEMAKAIAN PESTISIDA <i>METIL BROMIDA</i> .....	33
2.1 Bentuk Pelanggaran Dari Pemakaian Pestisida <i>Metil bromida</i> ....	33
2.2 Penyelesaian Hukum Dari Pemakaian <i>Metil bromida</i> .....	45
2.3 Pendapat Peneliti.....	58
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PEMAKAIAN PESTISIDA <i>METIL BROMIDA</i> .....	60
3.1 Bentuk Kebijakan Pemerintah Mencari Pengganti Dari <i>Metil bromida</i> .....	60
3.2 Tanggung Jawab Pemerintah Pada Pemakaian Pestisida <i>Metil bromida</i> .....	75
3.3 Pendapat Peneliti.....	86



BAB IV	PENUTUP.....	88
	4.1 Kesimpulan.....	88
	4.2 Saran.....	89
DAFTAR BACAAN.....		90

## ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam ratifikasi *protokol montreal*, yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon di atmosfer bumi. kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Ratifikasi *Protokol montreal* Dalam Hal Pemakaian Pesticida Terbatas *Metil bromida*”** ini menganalisa mengenai pemakaian pestisida terbatas metil bromide.

Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum *primer dan sekunder*. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemakaian *methyl bromida* menetapkan standar fumigasi yang sesuai dengan AQIS. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagian besar diperuntukkan oleh pihak perusahaan-perusahaan industri serta masyarakat yang menjadi konsumen. Pemerintah harus mengawasi dan mengendalikan penggunaan *methyl bromida* di wilayah pertanian nasional untuk mencegah penyebaran penyakit tanaman hama dan penyakit tanaman buatan. Regulasi dan pedoman yang berlaku serta memastikan penggunaan *Metil bromida* dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Pemerintah terus mengawasi penggunaan *Metil bromida* dan mendorong perusahaan untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pemakaian *methyl bromida* terdapat sanksi administratif, seperti pencabutan izin, pembekuan, atau penghentian kegiatan fumigasi. Sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau pengganti kerugian. Sanksi perdata, seperti ganti rugi, pembatalan kontrak, atau larangan melakukan perbuatan tertentu

Berdasarkan kondisi di atas, maka saran kepada pihak pemerintah harus meningkatkan sosialisasi bahwa *Metil bromida* hanya boleh digunakan untuk karantina dan pengapalan serta pestisida pengganti yang dapat digunakan untuk fumigasi. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa pembuatan brosur/leaflet, spanduk/baliho di tempat-tempat strategis, dan pertemuan sosialisasi dengan perusahaan fumigasi, importir, dan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi..

**Kata kunci:** *Tanggung Jawab Pemerintah, Ratifikasi Protokol montreal, Metil bromida*



## ABSTRACT

*The government has a very important responsibility in the ratification of the Montreal protocol, which aims to protect the ozone layer in the earth's atmosphere. The power and authority possessed by the government in carrying out its duties and responsibilities. The research entitled "Government Responsibility for the Ratification of the Montreal Protocol Regarding the Use of the Limited Pesticide Methyl Bromide" analyzes the use of the limited pesticide methyl bromide.*

*Research is a type of normative legal research. By using two problem approaches, the first is the statutory approach. Second, the conceptual approach. Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing documents, internet searches, and enriching legal literature.*

*The results of this research found that the government's responsibility in using methyl bromide is to set fumigation standards that are in accordance with AQIS. The policies made by the government are mostly intended for industrial companies and the public who are consumers. The government must supervise and control the use of methyl bromide in national agricultural areas to prevent the spread of pest plant diseases and artificial plant diseases. Applicable regulations and guidelines ensure that the use of methyl bromide is carried out correctly and responsibly. The government continues to monitor the use of methyl bromide and encourages companies to switch to more environmentally friendly alternatives. The legal resolution for violations of the use of methyl bromide includes administrative sanctions, such as revocation of permits, suspension or termination of fumigation activities. Criminal sanctions, such as imprisonment, fines, or compensation for losses. Civil sanctions, such as compensation, cancellation of contracts, or prohibition of certain actions*

*Based on the conditions above, the government's suggestion is to increase awareness that methyl bromide can only be used for quarantine and shipping and that substitute pesticides can be used for fumigation. The outreach carried out can take the form of making brochures/leaflets, banners/billboards in strategic places, and outreach meetings with fumigation companies, importers, and other government agencies such as the Ministry of Transportation, Ministry of Manpower and Transmigration.*

**Key words: Government Responsibility, Ratification of the Montreal Protocol, Methyl Bromide**